

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengaruh arus globalisasi yang makin meluas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, serta karakteristik sumberdaya kelautan dan perikanan, akan berakibat pula pada pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Pati. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak dapat dilepaskan dan harus mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Sektor kelautan dan perikanan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor lain, khususnya sumberdaya perikanan laut yang pada yang hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Sumberdaya perikanan laut tropis memiliki banyak spesies yang relatif terbatas jumlahnya.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan.

Kabupaten Pati memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdiri-dari sumberdaya perairan pantai sepanjang \pm 60 Km dengan lebar 4 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut, sumberdaya perikanan air payau berupa tambak seluas \pm 10.329 Ha yang terdapat di sepanjang pesisir dan sumberdaya perikanan air tawar yang semakin berkembang.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut merupakan modal dasar pengembangan yang menjadi tumpuan harapan masyarakat dan menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu : (1) secara ekonomi mampu memberikan keuntungan bagi seluruh pelaku ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, (2) secara sosial memberikan jaminan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, (3) secara ekologi terpeliharanya kelestarian sumberdaya dan daya dukung

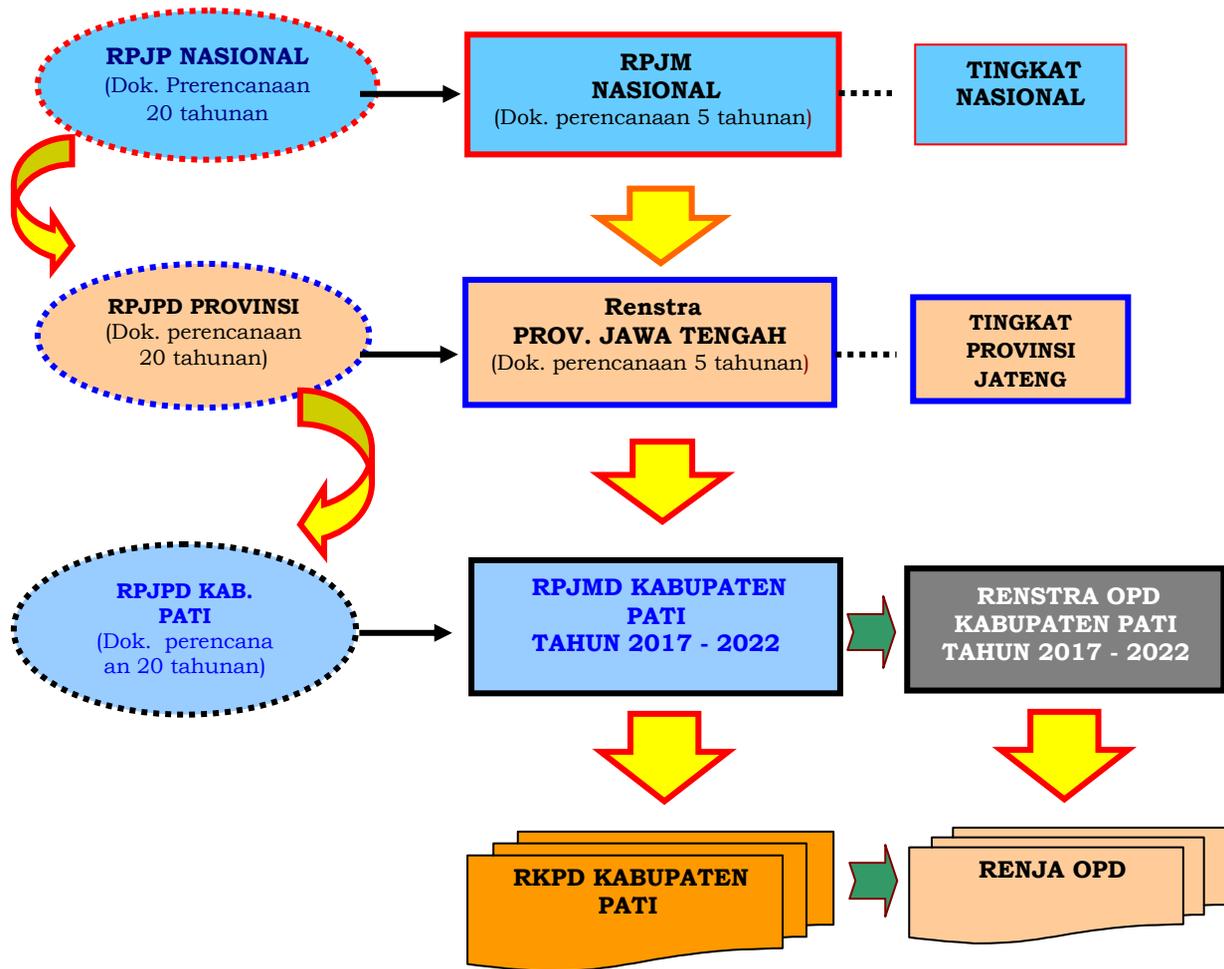
lingkungan dan (4) secara politik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bagi penguatan kesatuan dan persatuan bangsa.

Sejauh ini pembangunan kelautan dan perikanan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan namun belum optimal dan masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus segera dicari pemecahannya. Untuk itu pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang memerlukan kebijakan dan strategi yang tepat yang diimplementasikan dalam program dan kebijakan-kebijakan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pati di bidang kelautan dan perikanan dan disesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Kementerian dan Kelautan Perikanan sehingga akan terjadi kesesuaian rencana pembangunan di setiap tingkatan, khususnya pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (Lima) Tahunan, merupakan pejabaran teknis atas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Pati.

Gambar 1.1 Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain.



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 disusun mengacu pada sejumlah peraturan-perundangan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain meliputi :

1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten pati Tahun 2018 Nomor 1 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pati;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas, pokok fungsi dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan skala prioritas serta alat bantu untuk mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada akhir tahun dalam lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap, jelas dan utuh, maka Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan beserta struktur organisasinya, sumber daya Dinas Kelautan dan Perikanan, gambaran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta uraian tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra pemerintah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta uraian isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lima tahun ke depan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VIII. PENUTUP